

LAPORAN PENELITIAN

DANA RUTIN UMUM 1997/1998
KONTRAK NO:

JUDUL :

PERANAN TANAGA KERJA ASING DALAM PELAKSANAAN PROYEK
PENANAHAN MODAL ASING (PMA) DI SUMATERA BARAT
(Suatu Tinjauan Atas Pelaksanaan Undang Undang Tentang PMA)

Oleh :

MARDEHIS, SH.MS	(Ketua)
SOPIRMAN SOFYAN, SH	(Anggota)
SYAHRIAL RAZAK, SH	(Anggota)
DRS. IZHARMAN	(Anggota)
HARZIF, SH.MH	(Pembimbing)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
1997

ABSTRAK

Sebagai Negara Berkembang yang sedang giat membangun mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar, sedangkan dana dan modal yang dimiliki sangat terbatas. Karena itu pemerintah Indonesia dengan sekuat tenaga telah berusaha mencari sumber dana dan modal agar kesinambungan pelaksanaan pembangunan dapat selalu dipertahankan. Sumber dana dan modal tersebut ada yang berasal dari dalam, ada juga yang dicari dari luar negeri.

Karena itu sejak awal Orde Baru atau tegasnya sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), Indonesia secara resmi telah melibatkan diri pada eksistensi PMA tersebut. UU tentang PMA ini kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970, yang sekaligus mengatur tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam pelaksanaan proyek PMA tersebut.

Sumatera Barat sebagai bagian dari objek dan subjek pembangunan nasional, dalam upaya memacu gerak pembangunannya juga menghadapi keterbatasan dalam bidang dana dan modal. Karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah ini disamping menggunakan dana APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga menggunakan aliran dana berupa bantuan dana dan modal dari negara asing dan karena itu sebagai konsekuensinya daerah ini juga tidak dapat melepaskan diri dari penggunaan TKA terutama dalam pelaksanaan proyek proyek yang menggunakan dana PMA.

Bagaimanakah perkembangan penggunaan TKA melalui proyek PMA di daerah ini?, Apa manfaat yang dapat diperoleh SUMBAR dengan penggunaan TKA tersebut serta bagaimanakah peranan yang dimainkan para TKA tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini? Ketiga pertanyaan di atas merupakan hal hal yang dicoba dicarikan jawabannya dalam studi ini.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan penggunaan TKA dalam pelaksanaan pembangunan di SUMBAR menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dengan peningkatan penggunaan TKA tersebut, SUMBAR juga memperoleh manfaat yang besar, terutama dalam konteks alih teknologi dan manajemen terhadap pelaku pembangunan di daerah ini. Sedangkan mengenai peranan yang telah dimainkan oleh para TKA tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini sejauh yang penulis temukan di lapangan cukup prepersional, artinya posisi posisi yang dipegang oleh para TKA tersebut pada umumnya adalah posisi posisi yang memang membutuhkan keahlian khusus yang oleh sumberdaya manusia yang ada dan dimiliki daerah ini masih relatif sangat terbatas, misalnya konsultan teknik, manajer operasional, dan lain lain.

Akhirnya dengan telah diberlakukannya PP No. 20 tahun 1994 yang membolehkan PMA 100 %, maka tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah (termasuk SUMBAR), tentunya semakin ditantang, setidaknya dalam upaya mencegah munculnya monopoli oleh investor asing dalam praktek pembangunan dan aktifitas ekonomi di daerah ini.

Wallahu Allahu A'lamun Bis Shauwab

A. PENDAHULUAN

Tiap negara terutama yang sedang berkembang termasuk Indonesia, dalam rangka mewujudkan cita-cita politiknya menempuh dan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang secara bertahap, terutama pembangunan ekonomi nasionalnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bagi Indonesia, pelaksanaan pembangunan secara bertahap dan berencana dilakukan agar upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama, apalagi sumber daya yang dimiliki sangat terbatas.

Pelaksanaan pembangunan nasional, tentu membutuhkan dana dan modal yang sangat besar. Sebagaimana halnya negara-negara berkembang lainnya, kemampuan dana yang dimiliki Indonesia juga sangat terbatas, sedangkan pelaksanaan pembangunan nasional tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena itu, pemerintah dengan sekuat tenaga berusaha mencari sumber dana dan modal bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, baik dana yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Sumber dana dari dalam negeri antara lain berasal dari pajak, hasil tambang, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik (BUMN), dan dari sumber-sumber devisa negara lainnya. Sedangkan sumber dana dari luar negeri antara lain berupa bantuan keuangan, bantuan ahli, bantuan program dan proyek, bantuan teknologi, pinjaman modal berupa kredit, kegiatan operasional perusahaan multinasional dan penanaman modal asing (PMA).

Kesemua sumber dana dari luar negeri tersebut dilakukan secara selektif menurut relevansi kepentingan tujuan, serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka tahapan pembangunan nasional di Indonesia, kehadiran PMA memiliki arti khusus

sus terutama sehubungan dengan modal, teknologi dan keahlian manajemen yang dibawanya, tapi juga kelaziman operasional PMA ini yang pada umumnya diikuti dengan penggunaan tenaga kerja dari negara penanam modal tersebut.

Sebagai negara yang sangat membutuhkan bantuan modal asing dalam menggerakkan perekonomian nasionalnya, Indonesia sebenarnya sudah sejak lama berusaha mengantisipasi permasalahan penggunaan tenaga kerja asing yang mengiringi PMA ini, yakni dengan mengeluarkan UU No. 1 tahun 1967 yang mengatur baik tentang prosedur PMA begitu juga tentang penggunaan TKA yang mengiringi kegiatan PMA tersebut.

Sebagai negara yang sangat membutuhkan bantuan modal asing dalam menggerakkan perekonomian nasionalnya, Indonesia sebenarnya sudah sejak lama berusaha mengantisipasi permasalahan penggunaan tenaga kerja asing yang mengiringi PMA ini, yakni dengan mengeluarkan UU No. 1 tahun 1967 yang mengatur baik tentang prosedur PMA begitu juga tentang penggunaan TKA yang mengiringi kegiatan PMA tersebut. UU No. 1 tahun 1967 ini pada dasarnya membuka kesempatan (membolehkan) kepada pemilik modal (investor) asing untuk menggunakan tenaga kerja dari negara pemilik modal tersebut di perusahaan atau proyek yang menggunakan (dibiayai) dengan modal asing. Namun pemerintah juga memberikan batasan-batasan untuk hal ini, sehingga pemilik modal asing tidak dapat semaksimalnya dalam menggunakan tenaga asing. Sebagaimana tercantum dalam pasal 10 UU No. 1 tahun 1967 (UU PMA), bahwa perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia, kecuali dalam hal-hal seperti disebutkan dalam pasal 11 UU ini, yang pada intinya menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga tenaga pimpinan dan tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan PMA dan TKA di Sumatera Barat

Secara umum perkembangan PMA dan TKA di Sumatera Barat dapat dikatakan cukup baik dan terkendali. Hal ini misalnya tergambar dari daftar inventarisasi yang terdapat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPD) Sumatera Barat dan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) Sumatera Barat mengenai PMA dan TKA yang ada di Sumatera Barat seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel Perkembangan Proyek PMA di Sumatera Barat
tahun 1990 - 1995*

TAHUN	LOKASI PMA	JUMLAH PMA
1990	Padang	1
1991	Padang	1
1992	Padang Pariaman	2
1993	Agam, Pasaman	2
1994	Sawahlunto dan Padang Pariaman	5
1995	Huaro Sijunjung, Pariaman	6

*Sumber data BKPD Sumbar 1997.

Berdasar data dari tabel di atas tergambar adanya angka konsistensi atau peningkatan baik pada PMA begitu juga pada penggunaan TKA di Sumatera Barat. Sekaligus dapat dilihat bahwa konsistensi angka penanaman modal asing di Sumatera Barat sangat berpengaruh pada konsistensi angka penggunaan TKA. Artinya semakin besar tingkat PMA, maka akan semakin banyak pula penggunaan TKA di daerah ini, karena pemilik modal akan merasa terdorong untuk menanamkan modalnya apabila tenaga kerja yang dipekerjakan dalam proyek penanaman modal tersebut sebagian adalah tenaga kerja yang berasal dari negara pemilik modal yang bersangkutan.

Adapun bidang-bidang usaha dari PMA di Sumatera Barat antara lain meliputi usaha perhotelan, usaha wisata tirta, usaha pusat fasilitas olah raga, usaha kebun binatang, biro perjalanan dan angkutan wisata,

F. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah secara panjang lebar penulis menguraikan tentang perkembangan PMA dan TKA serta realisasi dan peronannya dalam pembangunan nasional di Dati I Propinsi Sumatera Barat, maka kini tiba saatnya bagi penulis untuk mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagaimana halnya dengan negara negara berkembang lainnya, maka pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya lewat pelaksanaan pembangunan nasional juga mengalami kendala berupa terbatasnya dana dan modal (dalam negeri) yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu jalan yang diambil adalah dengan menghimpun para investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Kehadiran para investor asing tersebut umumnya juga dibarengi dengan kehadiran para TKA terutama yang berasal dari negara asal pemilik modal datang. Kehadiran para TKA ini disamping dapat mendatangkan keuntungan bagi pelaksanaan pembangunan nasional di Sumatera Barat seperti terjadinya proses alih teknologi, pajak penghasilan dan pajak bangsa asing. Namun demikian kehadiran mereka juga dapat melahirkan benih benih kecemburuan sosial dari TKI lokal, terutama oleh karena jumlah gaji yang diterima para TKA terangat jauh bedanya dengan jumlah gaji yang diterima para TKI untuk posisi yang kurang lebih sama.
3. Sampai penelitian ini dilakukan, maka mengenai penggunaan TKA di Sumatera Barat melalui PMA dapat dikatakan cukup proporsional atau relatif seimbang bila dibandingkan dengan jumlah (peningkatan) proyek PMA setiap tahunnya.

4. Akhirnya mengingat posisi posisi yang diisi oleh para TKA dalam pelaksanaan proyek PMA di Sumatera Barat selama ini pada umumnya adalah posisi posisi yang memang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, maka dapat ditegaskan bahwa peranan para TKA tersebut dalam pelaksanaan proyek PMA di daerah ini adalah cukup strategis dan menentukan bagi suksesnya pelaksanaan proyek tersebut.

B. Saran saran

1. Untuk dapat mengundang minat para investor asing agar bersedia menanamkan modalnya secara lebih banyak dan besar lagi di Sumatera Barat, maka Pemda Sumatera Barat perlu lebih menciptakan iklim yang semakin kondusif bagi kehadiran investor asing tersebut, misalnya dengan semakin mengurangi jalur birokrasi yang berbelit belit dan berbelit terutama dalam proses perizinan, dan sebagainya.
2. Kendatipun demikian dalam hal penggunaan TKA dalam pelaksanaan proyek proyek PMA tersebut, Pemda Sumatera Barat perlu lebih selektif lagi sehingga posisi posisi yang ditempati para TKA tersebut benar benar posisi posisi yang belum mampu diisi oleh TKI lokal.
3. Sejalan dengan point (2) di atas, maka pelaksanaan dari peraturan yang mengharuskan para investor asing melaksanakan pelatihan bagi para TKI agar benar benar dikontrol dengan continue, sehingga proses silih teknologi dapat benar benar terjadi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku
1. B. Napitupulu, dkk , *Joint Venture di Indonesia*
Penerbit Erlangga, Jakarta 1975.
2. H.S. Syarif ; *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing
di Indonesia dan Peraturan-Peraturannya*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta,
1982.
3. Joan Robinson , *Pengantar Teori Kesejahteraan Kerja*,
diterjemahkan oleh A.Lobis, Penerbit
Bhratara Jakarta 1964.
4. Sritua Arief, Adi Sasono , *Modal Asing, Beban
Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indone-
sia* , Penerbit LSP UI, Jakarta, 1987,
hal.XV.
5. Sumantoro , *Kegiatan Perusahaan Multinasional :
Problema Politik, Hukum dan Ekonomi
Dalam Pembangunan Nasional* , Penerbit
PT. Gramedia, Jakarta 1987.
6. Sumitro Djojohadikusumo , *Masalah Penduduk dan
Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi
dan Perdagangan* , Yayasan Penyuluh dan
Penerangan Perdagangan, Jakarta 1973.